



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 - Jawa Tengah  
Telepon : (024) 3543063 - Faksimili : (024) 3546795  
Laman: [jateng.kemenkumham.go.id](http://jateng.kemenkumham.go.id) Surel: [kanwil.jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil.jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W13.HA.02.04-50  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Pelaksanaan Pelaporan  
Aksi HAM B04 Tahun 2023

03 Maret 2023

Yth. 1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah  
2. Bupati/Walikota se Jawa Tengah  
di

Tempat

Menindaklanjuti surat Plt. Direktur Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: HAM-HA.02.03-02 tanggal 28 Februari 2023 perihal Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM B04 Tahun 2023 dan Penyampaian Format Laporan Aksi HAM, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan capaian pelaksanaan aksi HAM Pemerintah Daerah secara teknis dilakukan 4 (empat) bulan sekali melalui tahapan B04, B08, B12 dan disampaikan kepada Presiden setiap 12 (dua belas) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
2. Khusus pelaporan capaian RANHAM B04 akan dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan 05 Mei 2023 melalui sistem pemantauan Kantor Staf Presiden aplikasi serambi [ksp.go.id](http://ksp.go.id);
3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dilakukan berdasarkan capaian aksi HAM pada periode Januari - April 2023;
4. Format laporan dan format lampiran/data dukung untuk pelaporan aksi HAM Daerah Tahun 2023 (B04, B08 dan B12) terlampir.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Moh. Hawary Dahlan selaku Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM melalui nomor selular/WA 081275275890 atau Sdr. Septian Asriwanto melalui nomor selular/WA 081311162553.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. A. Yuspahrudin  
NIP 196305281985031002

Tembusan:  
Plt. Direktur Jenderal HAM, di Jakarta.

**FORMAT PELAPORAN AKSI 1 DAN DATA DUKUNG CAPAIAN AKSI HAM PEMERINTAH PROVINSI  
B04, B08, DAN B12 TAHUN 2023**

<b>Kelompok Sasaran</b>	Perempuan		
<b>Aksi 1</b>	Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.		
<b>Kriteria Keberhasilan</b>	Meningkatnya partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.		
	<b>Ukuran Keberhasilan</b>	<b>Data dukung</b>	<b>Keterangan</b>
B04	Perencanaan kebijakan/ program/ kegiatan tentang bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bagi perempuan kepala keluarga untuk berwirausaha	<p>1. Dokumen perencanaan kebijakan/ program/ kegiatan/ dokumen lainnya yang terkait tentang bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bagi perempuan kepala keluarga untuk berwirausaha</p> <p>*Dokumen perencanaan dapat berupa ToR/ KaK/ proposal kerja sama/ kemitraan/ lainnya yang terkait</p>	<p>Aksi ini diharapkan agar pemerintah provinsi mempunyai kebijakan/ program/ kegiatan untuk meningkatkan partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga dalam berwirausaha.</p> <p>Perempuan kepala keluarga yang dimaksud dibuktikan di dalam kartu keluarga.</p> <p>Tahapan pada B04 adalah perencanaan, sedangkan implementasi di B08, dan evaluasi di B12.</p> <p>Berikut adalah beberapa contoh kebijakan/ program/ kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga dalam berwirausaha sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemudahan akses modal/ simpan pinjam;</li> <li>2. Pemasaran produk/ promosi melalui kegiatan langsung/ digital;</li> <li>3. Kemitraan bisnis;</li> <li>4. Kolaborasi dengan para penyedia <i>platform e-commerce/ marketplace</i>;</li> <li>5. Peningkatan kapasitas dalam berwirausaha;</li> <li>6. Dan lainnya yang mendorong perempuan berwirausaha.</li> </ol>

			Kebijakan/ program/ kegiatan sendiri tidak harus spesifik kepada perempuan kepala keluarga, tapi harus dipastikan bahwa di antara penerima contoh kebijakan/ program/ kegiatan tersebut terdapat perempuan terutama perempuan kepala keluarga
B08	Identifikasi implementasi kebijakan/ program/ kegiatan tentang bantuan usaha dan/atau membangun hubungan kemitraan bagi perempuan kepala keluarga untuk berwirausaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar implementasi kebijakan/ program/ kegiatan tentang bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bagi perempuan kepala keluarga untuk berwirausaha;</li> <li>2. Laporan program/kegiatan dan dokumentasi. Di dalam laporan disampaikan data terpilah perempuan kepala keluarga yang mendapat kebijakan/program.</li> </ol>	<p>Kebijakan dapat berbentuk pergub dan/atau kebijakan/ kegiatan/ program yang dikeluarkan dinas koperasi/UMKM atau instansi terkait lainnya di tingkat provinsi (seperti SK Kepala Dinas)</p> <p>Kebijakan/ program dapat yang berupa kerja sama/ kemitraan dengan institusi lainnya baik pemerintah, swasta, maupun LSM.</p>
B12	Evaluasi kebijakan/ program/ kegiatan tentang bantuan usaha dan/atau membangun hubungan kemitraan bagi perempuan kepala keluarga untuk berwirausaha yang telah dilaksanakan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan evaluasi singkat tentang implementasi kebijakan/ program/ kegiatan tentang bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bagi perempuan kepala keluarga untuk berwirausaha</li> </ol>	Laporan evaluasi singkat yang diminta berisikan bentuk kebijakan/ program/ kegiatan yang telah diimplementasi, capaian keberhasilannya, serta tantangan dan kendala yang dihadapi.

**FORMAT B04 AKSI 1 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

**Provinsi:**

<b>No.</b>	<b>Dokumen Perencanaan Kebijakan/ Program/ Kegiatan</b>	<b>Ringkasan (Garis Besar) Rencana Kebijakan/ Program/ Kegiatan Untuk Meningkatkan Partisipasi dan Akses Perempuan Kepala Keluarga dalam Berwirausaha</b>	<b>Target Jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang Mendapat Kebijakan/ Program/ Kegiatan</b>
1.			
2.			
3.	<i>Dst</i>		

**Aspek Penilaian:**

1. Terdapat dokumen tentang perencanaan kebijakan/ program/ kegiatan untuk meningkatkan partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga dalam berwirausaha;
2. Kebijakan/ program/ kegiatan menyesuaikan keadaan masing-masing daerah (tidak terpaku oleh kegiatan tertentu). Misal, kemudahan akses modal bagi perempuan, promosi, kemitraan bisnis, dan lainnya.

....., .....

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang mengeluarkan data)

Cap/Stempel dan Tanda Tangan

( )

**FORMAT B08 AKSI 1 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

**Provinsi:**

No.	Kebijakan/ Program/ Kegiatan Untuk Meningkatkan Partisipasi dan Akses Perempuan Kepala Keluarga dalam Berwirausaha	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana atau Kemitraan/ Kerja Sama dengan Institusi Lain dalam Melaksanakan Kebijakan/ Program/ Kegiatan <i>(diisi centang)</i>			Ket. (diisi nama institusi yang menjadi pelaksana atau mitra dari kebijakan/ program/ kegiatan)	Target Jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang Mendapat Kebijakan/ Program/ Kegiatan <i>(data B04)</i>	Jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang Mendapat Kebijakan/ Program/ Kegiatan
			Pemerintah	Swasta	LSM			
1.								
2.								
3.	<i>Dst</i>							

**Aspek Penilaian:**

1. Dilaksanakannya kebijakan/ program/ kegiatan untuk meningkatkan partisipasi dan akses perempuan kepalakeluarga dalam berwirausaha;
2. Terdapat jumlah perempuan kepala keluarga yang menjadi sasaran kebijakan/ program/ kegiatan tersebut.

....., .....

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang mengeluarkan data)

Cap/Stempel dan Tanda Tangan

( )

**FORMAT B12 AKSI 1 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

**Provinsi:**

No.	Kebijakan/ Program/ Kegiatan Untuk Meningkatkan Partisipasi dan Akses Perempuan Kepala Keluarga dalam Berwirausaha	Evaluasi Singkat tentang Implementasi Kebijakan/ Program/ Kegiatan untuk Meningkatkan Partisipasi dan Akses Perempuan Kepala Keluarga dalam Berwirausaha		Rencana Tindak Lanjut setelah Evaluasi
		Capaian Keberhasilan	Tantangan dan Kendala	
1.				
2.				
3.	<i>Dst</i>			

**Aspek Penilaian:**

1. Aksi B08 harus dilaksanakan untuk dapat mengisiformat aksi B12.
2. Terdapat evaluasi singkat berupa capaian keberhasilan, serta tantangan dan kendala dari kebijakan/ program/ kegiatan terkait peningkatan partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga dalam berwirausaha;
3. Terdapat rencana tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga dalam berwirausaha.

....., .....

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang mengeluarkan data)

Cap/Stempel dan Tanda Tangan

( )

**FORMAT PELAPORAN AKSI 2 DAN DATA DUKUNG CAPAIAN AKSI HAM PEMERINTAH PROVINSI  
B04, B08, DAN B12 TAHUN 2023**

<b>Kelompok Sasaran</b>	Perempuan		
<b>Aksi 2</b>	Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum.		
<b>Kriteria Keberhasilan</b>	Perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat berhadapan dengan hukum mendapatkan keadilan atas kekerasan yang dialami dalam proses penegakan hukum.		
	<b>Ukuran Keberhasilan</b>	<b>Data dukung</b>	<b>Keterangan</b>
B04	Pemetaan kabupaten/kota yang sudah dan belum mendapatkan sosialisasi terkait urgensi kebijakan afirmatif bantuan hukum bagi anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat di tahun 2022	Daftar Kabupaten/Kota di satu Provinsi yang sudah dan belum mendapatkan sosialisasi di tahun 2022	Provinsi juga perlu mencantumkan alasan terdapat kabupaten/kota masih belum mendapatkan sosialisasi di tahun 2022
B08	100% kabupaten/kota di satu Provinsi telah mendapatkan sosialisasi terkait urgensi kebijakan afirmatif bantuan hukum bagi anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undangan sosialisasi</li> <li>2. TOR/KAK sosialisasi</li> <li>3. Laporan yang memuat materi narasumber, daftar hadir peserta, hasil kegiatan, dan dokumentasi.</li> </ol>	<p>Kebijakan Afirmatif bantuan hukum adalah kebijakan yang memberi keistimewaan/keutamaan pada kelompok/golongan tertentu (dalam hal ini kepada 4 kelompok sasaran: Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat) agar memperoleh peluang yang setara dalam mendapatkan bantuan hukum.</p> <p>Target persentase 100% yang dimaksud adalah Pemerintah Provinsi dengan peserta sosialisasi yang berasal dari seluruh pemerintah</p>

			<p>kabupaten/kota di Provinsitersebut.</p> <p>Sebagai contoh, di Provinsi A terdapat 30 Kab/Kota, maka 100% yang dimaksud dalam Ukuran Keberhasilan adalah 30kab/kota tersebut menghadiri sosialisasi.</p>
B12	<p>Implementasi hasil sosialisasi terkait urgensi kebijakan afirmatif bantuan hukum bagi anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat menjadi kebijakan/ program/ draf Perda/ draf Pergub</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar kabupaten/kota yang telah memiliki kebijakan/ program/ draf Perda/ draf Pergub terkait bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.</li> <li>2. Dokumen kebijakan/program/Perda/draf Perda/Pergub/ draf Pergub atau jenis kebijakan lainnya yang terkait.</li> </ol>	<p>Minimal 50% kabupaten/kota memiliki kebijakan/program/ draf Perda/ draf Pergub terkait bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat</p>



**FORMAT B04 AKSI 2 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

**Provinsi:**

No.	Kabupaten/Kota	Telah mendapatkan sosialisasi terkait urgensi kebijakan afirmatif bantuan hukum bagi anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat <i>(diisi centang)</i>		Ket. (Apabila belum mendapatkan sosialisasi)
		Sudah	Belum	
1.				
2.				
3.	<i>Dst....</i>			

**Aspek Penilaian:**

Terdapat pemetaan seluruh kabupaten/kota di bawah provinsi baik yang sudah dan belum mendapatkan sosialisasi.

....., .....

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang mengeluarkan data)

Cap/Stempel dan Tanda Tangan

( )

**FORMAT B08 AKSI 2 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

**Provinsi:**

<p align="center"><b>Kabupaten Kota Yang Mendapatkan Sosialisasi terkait urgensi kebijakan afirmatif bantuan hukum bagianak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat</b></p>			<p align="center"><b>Ringkasan Materi Sosialisasi</b></p>
<p align="center"><b>Jumlah seluruh kab/kota</b></p>	<p align="center"><b>Jumlah kab/kota yang ikut</b></p>	<p align="center"><b>Jumlah kab/kota yang tidak ikut</b></p>	

**Aspek Penilaian:**

1. Terlaksananya sosialisasi terkait urgensi kebijakan afirmatif bantuan hukum bagi anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat bagi seluruh kabupaten/kota di bawah provinsi.
2. Substansi materi sesuai

....., .....

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang mengeluarkan data)

Cap/Stempel dan Tanda Tangan

( )

**FORMAT B12 AKSI 2 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

**Provinsi:**

No.	Kabupaten/ Kota	Terdapat implementasi bantuan hukum pada kelompok sasaran anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat					Jenis Rancangan / Produk hukum/ program/ anggaran (umum atau sudah terfokus 4 kelompok sasaran)	Rencana Tindak Lanjut Implementasi
		Perda/ Produk Hukum Daerah	Nama Program	Anggaran APBD (dicentang apabila ada)	Rancangan Produk hukum daerah	Lainnya yang terkait (sebutkan)		
1.								
2.								
3.	<i>Dst....</i>							

**Aspek Penilaian:**

1. Terdapat daftar kabupaten/kota yang mengimplementasikan kebijakan/ program/ lainnya terkait bantuan hukum bagi anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat bagi seluruh kabupaten/kota di bawah provinsi.
2. Terdapat lampiran data dukung berupa dokumen kebijakan/program/Perda/draf Perda/Pergub/ draf Pergub atau jenis kebijakan lainnya yang terkait.
3. Terdapat rencana tindak lanjut implementasi.

.....  
 Kepala.....  
 (atau pejabat struktural yang mengeluarkan data)  
 Cap/Stempel dan Tanda Tangan  
 ( )

## KELOMPOK SASARAN ANAK

### FORMAT PELAPORAN AKSI 3 DAN DATA DUKUNG CAPAIAN AKSI HAM PEMERINTAH PROVINSI B04, B08, DAN B12 TAHUN 2023

<b>Kelompok Sasaran</b>	Anak		
<b>Aksi 3</b>	Pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan anak-anak dari kelompok: 1. Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan 2. Kelompok Masyarakat Adat (KMA) 3. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).		
<b>Kriteria Keberhasilan</b>	Terpenuhinya hak-hak atas pendidikan anak-anak di wilayah 3T, kantong kemiskinan, anak-anak kelompok masyarakat adat, anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)		
	<b>Ukuran Keberhasilan</b>	<b>Data dukung</b>	<b>Keterangan</b>
B04	Terdapat hasil pemetaan anak-anak usia pendidikan menengah atas (SLTA/SMA/Sederajat) yang berhak menerima layanan khusus hak-hak pendidikan dari kelompok: (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil pemetaan anak-anak usia pendidikan menengah atas dari 3 kelompok sasaran yang berhak mendapatkan layanan khusus hak-hak Pendidikan;</li> <li>Dokumen data dukung penguat penjelasan (apabila diperlukan)</li> </ol>	Pemetaan menyesuaikan kondisi provinsi masing-masing.
B08	Identifikasi program layanan khusus hak-hak pendidikan menengah atas bagi anak-anak yang berasal dari kelompok (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar program terkait layanan khusus hak-hak pendidikan menengah atas bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran yang diberikan oleh provinsi;</li> <li>ToR/ KaK program</li> </ol>	Contoh layanan khusus pendidikan dapat berupa bantuan dana pendidikan, beasiswa, dan bentuk-bentuk lainnya.
B12	Pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan tingkat menengah atas/ sederajat kepada anak-anak yang berasal dari kelompok (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah anak dari salah satu atau lebih kelompok sasaran yang mendapatkan layanan khusus hak-hak pendidikan menengah atas/ sederajat pada bulan Januari sampai November 2023</li> <li>Laporan singkat layanan khusus hak-hak pendidikan tingkat menengah atas/ sederajat kepada anak-anak yang berasal dari</li> </ol>	Kewenangan Provinsi terhadap penyediaan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan diatur di dalam Permendagri No.59 Tahun 2021

		kelompok (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).	
--	--	--	--

**FORMAT B04 AKSI 3 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

**Provinsi:**

<b>Jumlah anak-anak usia Pendidikan menengahatas (SLTA/SMA/Sederajat) dari 3 kelompok sasaran yang berhak mendapatkan layanan khusus hak-hak pendidikan</b>				<b>Penjelasan</b> (apabila ada salah satu/ lebih kelompok sasaran yang tidak ada)
<b>Tinggal di daerah 3T dan/atau kantong kemiskinan</b>	<b>Kelompok Masyarakat Adat (KMA)</b>	<b>Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)</b>	<b>Total</b>	

**Aspek Penilaian:**

1. Diisinya kolom jumlah anak usia pendidikan menengah atas (SLTA/SMA/Sederajat) dari 3 kelompok sasaran yang berhakmendapatkan layanan khusus hak-hak pendidikan;
2. Penjelasan disertai dengan data dukung penguat apabila terdapat salah satu/ lebih kelompok sasaran yang tidak ada.

....., .....

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang mengeluarkan data)

Cap/Stempel dan Tanda Tangan

( )

**FORMAT B08 AKSI 3 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

**Provinsi:**

No.	Program terkait layanan khusus hak-hak pendidikan menengah atas bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran yang diberikan oleh provinsi	Peruntukan Kelompok Sasaran (Satu program bisa untuk lebih dari satu kelompok sasaran) *dicentang			Pelaksana		Kendala (Apabila ada)
		Tinggal di daerah 3T dan/atau kantong kemiskinan	Kelompok Masyarakat Adat (KMA)	Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)	Pemerintah (sebutkan OPD)	Pihak Lain yang bekerja sama dengan Provinsi (sebutkan Lembaga swasta/ LSM/ lainnya)	
1.							
2.							
3.	Dst....						

**Aspek Penilaian:**

1. Terdapat program terkait layanan khusus hak-hak pendidikan menengah atas bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran yang diberikan oleh provinsi .
2. Terdapat dokumen lampiran berupa ToR/ Kak program tersebut.

....., .....

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang mengeluarkan data)

Cap/Stempel dan Tanda Tangan

( )

## FORMAT B12 AKSI 3 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

**Provinsi:**

No.	Nama program terkait layanan khusus hak-hak pendidikan menengah atas bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran yang diberikan oleh provinsi	Jumlah Anak SLTA dan/atau sederajat yang telah mendapatkan program			Kendala (Apabila ada)
		Tinggal di daerah 3T dan/atau kantong kemiskinan	Kelompok Masyarakat Adat (KMA)	Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)	
1.					
2.					
3.	Dst....				

**Aspek Penilaian:**

1. Terdapat layanan khusus hak-hak pendidikan menengah atas bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran yang diberikan oleh provinsi
2. Terdapat jumlah anak usia SLTA/Sederajat yang mendapatkan layanan khusus hak pendidikan
3. Terdapat laporan singkat pelaksanaan layanan khusus pendidikan menengah atas bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran

....., .....

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang mengeluarkan data)

Cap/Stempel dan Tanda Tangan

( )



**FORMAT PELAPORAN AKSI 4 DAN DATA DUKUNG CAPAIAN AKSI HAM PEMERINTAH PROVINSI  
B04, B08, DAN B12 TAHUN 2023**

<b>Kelompok Sasaran</b>	Anak		
<b>Aksi 4</b>	Pemberian layanan khusus hak-hak kesehatan anak-anak dari kelompok: 1. Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan 2. Kelompok Masyarakat Adat (KMA) 3. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).		
<b>Kriteria Keberhasilan</b>	Terpenuhinya hak-hak atas kesehatan anak-anak di wilayah 3T, kantong kemiskinan, anak-anak kelompok masyarakat adat, anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)		
	<b>Ukuran Keberhasilan</b>	<b>Data dukung</b>	<b>Keterangan</b>
B04	Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka pemetaan situasi kesehatan anak-anak yang berasal dari kelompok: (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil pemetaan situasi kesehatan anak-anak yang berasal dari kelompok: (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS);</li> <li>Notulensi dan dokumentasi rapat koordinasi pemetaan situasi anak kesehatan anak-anak dari kelompok (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)</li> </ol>	Kewenangan Provinsi terhadap penyediaan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan diatur di dalam Permendagri No.59 Tahun 2021 (Sesuai dengan Form 2.C.2, halaman 124 Lampiran Permendagri)
B08	Identifikasi program layanan khusus hak-hak kesehatan menengah bagi anak-anak yang berasal dari kelompok (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar program terkait layanan khusus hak-hak pendidikan menengah atas bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran yang diberikan oleh provinsi;</li> <li>ToR/ KaK program</li> </ol>	Contoh layanan khusus kesehatan dapat berupa puskesmas keliling, pemeriksaan kesehatan umum bagi anak dari 3T dan/ kantong kemiskinan, KMA, dan anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)

			atau program layanan lainnya sesuai dengan keunikan dan situasi masing-masing provinsi.
B1 2	Pemberian layanan khusus hak-hak kesehatan anak-anak yang berasal dari kelompok (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah anak dari salah satu atau lebih kelompok sasaran yang mendapatkan layanan khusus hak-hak kesehatan pada bulan Januari sampai November 2023;</li> <li>2. Laporan singkat layanan khusus hak-hak kesehatan kepada anak-anak yang berasal dari kelompok (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).</li> </ol>	Kewenangan Provinsi terhadap penyediaan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan diatur di dalam Permendagri No.59 Tahun 2021 (Sesuai dengan Form 2.C.2, halaman 124 Lampiran Permendagri)

**FORMAT B04 AKSI 4 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

**Provinsi:**

**PELAKSANAAN PEMETAAN**

<b>No.</b>	<b>OPD Penanggung Jawab</b>	<b>Waktu Pelaksanaan Rapat Pemetaan situasi kesehatan anak-anak yang berasal dari kelompok: (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)</b>	<b>Peserta</b> <i>(OPD dan/ atau lembagalainnya yang terkait)</i>
1.			
2.			

**HASIL PEMETAAN**

<b>No.</b>	<b>Kelompok Anak</b>	<b>Situasi Kesehatan yang perlu mendapatkan penanganan</b>	<b>Rencana Program Layanan Khusus Kesehatan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Tinggal di daerah 3T dan/ kantongkemiskinan			
2.	Kelompok Masyarakat Adat (KMA)			
3.	Anak dengan penyakit tertentu(HIV/AIDS)			

**Aspek Penilaian:**

1. Terlaksananya rapat pemetaan pemetaan situasi kesehatan anak-anak yang berasal dari kelompok: (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat(KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS);
2. Terdapat situasi pemetaan kesehatan dan rencana programlayananan khusus kesehatan

....., .....

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang mengeluarkan data)

Cap/Stempel dan Tanda Tangan

( )

## FORMAT B08 AKSI 4 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

**Provinsi:**

No.	Program terkait layanan khusus hak-hak kesehatan bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran yang diberikan oleh provinsi	Peruntukan Kelompok Sasaran (Satu program bisa untuk lebih dari satu kelompok sasaran) *dicentang			Pelaksana		Kendala (Apabila ada)
		Tinggal di daerah 3T dan/atau kantong kemiskinan	Kelompok Masyarakat Adat (KMA)	Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)	Pemerintah (sebutkan OPD)	Pihak Lain yang bekerja sama dengan Provinsi (sebutkan Lembaga swasta/ LSM/ lainnya)	
1.							
2.							
3.	Dst....						

**Aspek Penilaian:**

1. Terdapat program terkait layanan khusus hak-hak kesehatan bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran yang diberikan oleh provinsi.
2. Terdapat dokumen lampiran berupa ToR/ Kak program tersebut.

....., .....

Kepala.....  
(atau pejabat struktural yang mengeluarkan data)  
Cap/Stempel dan Tanda Tangan  
( )

**FORMAT B12 AKSI 4 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

**Provinsi:**

No.	Nama program terkait layanan khusus hak-hak kesehatan bagianak-anak dari 3 kelompok sasaran yang diberikan oleh provinsi	Jumlah anak yang telah mendapatkan program dari kelompok			Kendala (Apabila ada)
		Tinggal di daerah 3T dan/atau kantong kemiskinan	Kelompok Masyarakat Adat (KMA)	Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)	
1.					
2.					
3.	Dst....				

**Aspek Penilaian:**

1. Terdapat layanan khusus hak-hak kesehatan bagi kelompok sasaran yang diberikan oleh provinsi;
2. Terdapat jumlah anak yang mendapatkan layanan khusus hak-hak kesehatan
3. Terdapat laporan singkat pelaksanaan layanan khusus bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran

....., .....

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang mengeluarkan data)

Cap/Stempel dan Tanda Tangan

( )

**FORMAT PELAPORAN AKSI 5 DAN DATA DUKUNG CAPAIAN AKSI HAM PEMERINTAH PROVINSI  
B04, B08, DAN B12 TAHUN 2023**

<b>Kelompok Sasaran</b>	Anak		
<b>Aksi 5</b>	Melaksanakan program Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak.		
<b>Kriteria Keberhasilan</b>	Menurunnya jumlah pekerja anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.		
	<b>Ukuran Keberhasilan</b>	<b>Data dukung</b>	<b>Keterangan</b>
B04	Persiapan sosialisasi terkait dengan Indonesia Bebas Pekerja Anak (Bebas pekerja anak: bebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentasi</li> <li>2. Notulensi Rapat</li> <li>3. ToR/KAK kegiatan sosialisasi</li> </ol>	Provinsi melaksanakan sosialisasi, dengan peserta berasal dari Kabupaten/Kota dan/atau perusahaan-perusahaan. Pekerja anak yang dimaksud adalah pekerjaan yang membahayakan anak sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak dan prinsip Konvensi ILO No. 182 yang diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 2000. Contoh pekerjaan-pekerjaan terburuk untuk anak sesuai Konvensi ILO: praktik perbudakan, pornoaksi/pornografi, perdagangan obat-obatan, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan/atau moral anak-anak.
B08	Terlaksanakannya sosialisasi Indonesia Bebas Pekerja Anak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pertemuan (Undangan, Daftar Hadir, bahan/materi sosialisasi dan dokumentasi)</li> <li>2. Notulensi Hasil Pembahasan</li> </ol>	Sosialisasi dapat melibatkan kementerian terkait (Seperti KPPPA atau Kementerian Ketenagakerjaan) atau organisasi pekerja baik sebagai narasumber maupun sebagai peserta sosialisasi
B12	Identifikasi penurunan jumlah pekerja anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data penurunan jumlah pekerja anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.</li> <li>2. Rencana tindak lanjut dalam rangka konsistensi menurunkan jumlah pekerja anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.</li> </ol>	Data yang dimaksud adalah data penurunan jumlah pekerja anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak dari tahun-tahun sebelumnya.

**FORMAT B04 AKSI 5 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

**Rapat Internal OPD Penanggung Jawab Aksi terkait persiapan sosialisasi Indonesia Bebas Pekerja Anak**

No .	OPD Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Rapat persiapan sosialisasi Indonesia Bebas Pekerja Anak	Peserta	Ringkasan Hasil Rapat
1.				
2.				

**Aspek Penilaian:**

1. Terlaksananya rapat persiapan sosialisasi Indonesia Bebas Pekerja Anak
2. Melampirkan dokumen notulensi Rapat (harus memuat materi)
3. Terdapat KaK/ToR

....., .....

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang mengeluarkan data)

Cap/Stempel dan Tanda Tangan

( )

)

### FORMAT B08 AKSI 5 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

**Nama Kegiatan** :  
**Waktu Kegiatan** :  
**Tempat Kegiatan** : (silakan isi *zoom/google meet* bila dilakukan secara daring)  
**Provinsi** :  
**Total jumlah kab/kota** :

NO	Kabupaten/Kota <i>(yang telah mengikuti sosialisasi Indonesia Bebas Pekerja Anak)</i>	Nama Peserta	Unit/Satuan KerjaPeserta	Rencana Tindak Lanjutdi Tingkat Kab/Kota
1.				
2.				
3.				
4.				
	<i>Dst.</i>			

Yang belum mengikuti sosialisasi Indonesia Bebas Pekerja Anak :

NO	Kabupaten/Kota	Alasan Tidak Mengikuti	Rencana/ Target Waktu Pemberian sosialisasi Indonesia Bebas Pekerja Anak
1.			
2.			
3.			
	<i>Dst.</i>		

**Aspek Penilaian:**

- Terlaksananya sosialisasi Indonesia Bebas Pekerja Anak Kepada Kab/Kota
- Laporan Kegiatan (materi sosialisasi relevan/sesuai target, yang dibuktikan dengan pointer presentasi, dan rencana tindak lanjut oleh Kab/kota terkait Indonesia Bebas Pekerja Anak

.....  
 Kepala.....  
 (atau pejabat struktural yang  
 mengeluarkan data)  
 Cap/Stempel dan Tanda Tangan  
 ( )



**FORMAT B12 AKSI 5 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

**Data Penurunan jumlah pekerja anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.**

<b>No.</b>	<b>Nama Kab/Kota</b>	<b>Jumlah Pekerja Anak Tahun 2022</b>	<b>Jumlah Pekerja Anak dari Januari sampai dengan November Tahun 2023</b>	<b>Rencana Tindak Lanjut dalam rangka konsistensi menurunkan jumlah pekerja anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.</b>
1				
2				
3				
dst				

**Aspek Penilaian:**

1. Terdapat data jumlah pekerja anak Tahun 2022;
2. Terdapat penurunan Jumlah Pekerja Anak dari Januari sampai dengan November Tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya
3. Terdapat Rencana Tindak Lanjut dalam rangka konsistensi menurunkan jumlah pekerja anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak. (rencana tindak lanjut dapat berupa koordinasi dengan instansi terkait/ perumusan kebijakan/ produk hukum/ program/ kegiatan dalam rangka menurunkan jumlah pekerja anak yang dibuktikan dengan data dukung resmi dari OPD yang bertanggung jawab).

....., .....

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang  
mengeluarkan data)

(Cap/Stempel dan Tanda Tangan)

**KELOMPOK SASARAN****PENYANDANG DISABILITAS****FORMAT PELAPORAN AKSI 6 DAN DATA DUKUNG CAPAIAN AKSI HAM PEMERINTAH PROVINSI  
B04, B08, DAN B12 TAHUN 2023**

<b>Kelompok Sasaran</b>	Penyandang Disabilitas		
<b>Aksi 6</b>	Mendorong upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektorpemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta.		
<b>Kriteria Keberhasilan</b>	Meningkatnya jumlah perusahaan yang menyediakan sistem dukungan kerja (akomodasi yang layak) penyandang disabilitas di instansipemerintahan atau swasta sesuai dengan ragam disabilitas		
	<b>Ukuran Keberhasilan</b>	<b>Data dukung</b>	<b>Keterangan</b>
B04	Pertemuan koordinasi pelaksanaan Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> ) dan/atau perencanaan pencapaian target pekerja penyandang disabilitas di instansi pemerintah dan BUMD di tingkat provinsi.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Laporan hasil pertemuan koordinasi</li><li>- Daftar hadir</li><li>- Dokumentasi</li><li>- Hasil Identifikasi rencana/strategi pencapaian</li><li>- rget di tahun 2023</li></ul>	Pertemuan koordinasi bisa dilaksanakan secara internal. Hasil identifikasi rencana/strategi sesuai dengan peta jalan ( <i>roadmap</i> ) yang telah disusun pada tahun 2022. Rencana/strategi bisa berbentuk (Namun tidak terbatas): <i>Job fair</i> atau pelatihan.
B08	Adanya laporan pemantauan dan pelaksanaan Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> ) atau rencana pencapaian target pekerja penyandang disabilitas di instansi pemerintah dan BUMD di tingkat provinsi.  Cakupan laporan: Capaian target (persentase) masing-masing instansi dan BUMD yang sudah mempekerjakan penyandang disabilitas.	Laporan pemantauan dan pelaksanaan Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> ) atau rencana pencapaian target pekerja penyandang disabilitas di tingkat provinsi, yang mencakup di dalamnya: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Upaya/kegiatan yang telah dan belum dilaksanakan, sesuai <i>roadmap</i> yang telah disusun di 2023</li><li>b. Data OPD dan BUMD yang telah dan belum mempekerjakan Penyandang Disabilitas.</li><li>c. Data peningkatan persentase jumlah pekerja penyandang disabilitas di BUMD dan Instansi di tingkat Provinsi</li><li>d. Kendala dan tantangan pelaksanaan pemenuhan kuota pekerja disabilitas di OPD dan BUMD.</li></ul>	Pelaksanaan kegiatan pemantauan dapat berdasarkan kondisi di lapangan secara langsung
B12	1. Adanya hasil evaluasi pelaksanaan Peta Jalan	1. Laporan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> ) pencapaian target pekerja	Kebijakan ini dapat berupa peraturan eksekutif

	<p>(Roadmap) pencapaian target pekerja penyandang disabilitas di instansi pemerintah dan BUMD di tingkat provinsi berdasarkan hasil pemantauan Januari - Desember 2023.</p> <p>2. Pembahasan untuk perumusan kebijakan daerah yang mendorong OPD dan BUMD mempekerjakan penyandang disabilitas</p>	<p>penyandang disabilitas di instansi pemerintah dan BUMD di tingkat provinsi berdasarkan hasil pemantauan Januari - Desember 2023</p> <p>2. Rancangan kebijakan pemerintah daerah terkait dengan upaya mendorong OPD dan BUMD mempekerjakan penyandang disabilitas</p>	<p>(Gubernur) atau legislatif (DPRD) atau kebijakan lainnya yang lebih rendah, seperti surat edaran dan lainnya.</p>
--	--	---	--

**FORMAT B04 AKSI 6 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

<b>Nama Kegiatan</b> :	<b>Pertemuan Koordinasi pelaksanaan Peta Jalan (Roadmap) dan/atau perencanaan pencapaian target pekerja penyandang disabilitas di instansi pemerintah dan BUMD di tingkat provinsi.</b>
<b>Waktu Kegiatan</b> :	<i>(waktu dilaksanakan pada masa periode pelaporan B04)</i>
<b>Tempat Kegiatan</b> :	<i>(silakan isi zoom/google meet bila dilakukan secara daring)</i>
<b>Unit Pelaksana</b> :	
<b>Peserta Kegiatan</b> :	
1. Instansi Pemerintah	..... orang
2. BUMD	.... orang
Hasil identifikasi pencapaian target 2023	<p><i>Dituliskan sesuai dengan hasil pertemuan, misalnya:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. pencapaian target 2% akan dapat terwujud pada Desember 2023; atau,</i></li> <li><i>2. pencapaian target masih pada tahap pendataan, sehingga belum bisa tercapai pada 2023; atau,</i></li> <li><i>3. pencapaian target baru dapat terwujud hingga 0,5% untuk keseluruhan OPD dan BUMD di Provinsi; atau,</i></li> <li><i>4. pencapaian target 2% baru akan terwujud pada 2025, karena masih perlunya meningkatkan kesadaran dan pemahaman OPD dan BUMD;</i></li> <li><i>5. dll.</i></li> </ol>

Aspek Penilaian:

1. Pertemuan pembahasan pencapaian kuota pekerja penyandang disabilitas dilaksanakan.
2. Jumlah peserta yang hadir dalam pertemuan
3. Rencana pencapaian target pekerja penyandang disabilitas.

**s**

....., .....  
 Kepala.....  
 (atau pejabat struktural yang  
 mengeluarkan data)  
 (Cap/Stempel dan Tanda Tangan)

**FORMAT B08 AKSI 6 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

**Nama Provinsi:**

**Jumlah Total Organisasi Perangkat Daerah:**

**Jumlah Total BUMD:**

**1. Format Instansi Pemerintah**

No.	Nama Instansi(1)	Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas (2)		Catatan Kendala dan Tantangan (3)
		Jumlah	Persentase	
1.				
2.				
3.				
	<i>Dst.</i>			
<b>Rata-rata persentase (4)</b>		... %		

**2. Format Instansi BUMD**

No.	Nama Instansi (1)	Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas (2)		Catatan Kendala dan Tantangan(3)
		Jumlah	Persentase	
1.				
2.				
3.				
	<i>Dst.</i>			
<b>Rata-rata persentase (4)</b>		... %		

**Keterangan kolom:**

- (1) Nama instansi pemerintah. *(Pemantauan atau evaluasi ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, secara daring, alat komunikasi telepon, pertemuan/rapat, maupun kunjungan langsung. Data diharapkan sudah mencakup semua OPD, baik yang telah mempekerjakan maupun yang belum).*
- (2) Jumlah dan persentase pekerja penyandang disabilitas di instansi Pemerintah maupun BUMD, yang dihitung dari total pekerja di instansi/BUMD tersebut. Data per November 2023.
- (3) Catatan kendala dan tantangan peningkatan jumlah pekerja penyandang disabilitas di instansi pemerintah dan BUMD.
- (4) Rata-rata pencapaian kuota pekerja untuk semua instansi OPD dan BUMD

**Aspek Penilaian:**

1. Jumlah OPD yang didata di dalam Laporan
2. Pengisian jumlah dan persentase OPD di dalam Laporan
3. Jumlah BUMD yang didata di dalam Laporan
4. Pengisian jumlah dan persentase BUMD di dalam Laporan

....., .....

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang  
mengeluarkan data)

(Cap/Stempel dan Tanda Tangan)

**FORMAT B12 AKSI 6 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

**Provinsi:**

**1. Format Instansi Pemerintah**

No.	Nama Instansi(1)	Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas (2)		Catatan Kendala dan Tantangan (3)
		Jumlah	Persentase	
1.				
2.				
3.				
	<i>Dst.</i>			
<b>Rata-rata persentase (4)</b>		... %		

**2. Format Instansi BUMD**

No.	Nama Instansi (1)	Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas (2)		Catatan Kendala dan Tantangan (3)
		Jumlah	Persentase	
1.				
2.				
3.				
	<i>Dst.</i>			
<b>Rata-rata persentase (4)</b>		... %		

**Keterangan kolom:**

- (1) Nama instansi pemerintah. (*Pemantauan atau evaluasi ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, secara daring, alat komunikasi telepon, pertemuan/rapat, maupun kunjungan langsung. Data diharapkan sudah mencakup semua OPD, baik yang telah mempekerjakan maupun yang belum*).
- (2) Jumlah dan persentase pekerja penyandang disabilitas di instansi Pemerintah maupun BUMD, yang dihitung dari total pekerja di instansi/BUMD tersebut. Data per November 2023.
- (3) Catatan kendala dan tantangan peningkatan jumlah pekerja penyandang disabilitas di instansi pemerintah dan BUMD.
- (4) Rata-rata pencapaian kuota pekerja untuk semua instansi OPD dan BUMD

**3. Catatan Analisa Pembentukan Kebijakan/Produk Hukum Daerah terkait dengan Pekerja Penyandang Disabilitas di Instansi Pemerintah dan BUMD**

<b>Provinsi (1)</b>	
<b>Unit penanggung jawab (2)</b>	
<b>Analisa potensi pembentukan produk hukum daerah (3)</b>	

**Keterangan kolom:**

- (1) Nama provinsi
- (2) Unit penanggung jawab yang melakukan pembahasan terkait produk hukum daerah.
- (3) Analisa ini dapat berupa visibilitas/kemungkinan dibentuknya produk hukum untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas di dunia kerja, terutama di pemerintah daerah dan BUMD, termasuk pula tantangan dan kendala pembentukan produk hukum daerah tersebut.  
Analisa ini dapat dilakukan oleh instansi penanggung jawab melalui berbagai metode, misalnya, dengan pertemuan koordinasi internal atau antarinstitusi daerah, penelitian, FGD, pelibatan organisasi penyandang disabilitas dan perguruan tinggi, dan sebagainya.

**Aspek Penilaian:**

1. Jumlah OPD yang didata di dalam Laporan
2. Pengisian jumlah dan persentase OPD di dalam Laporan
3. Jumlah BUMD yang didata di dalam Laporan
4. Pengisian jumlah dan persentase BUMD di dalam Laporan
5. Analisa potensi pembentukan produk hukum daerah

....., .....

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang mengeluarkan data)

(Cap/Stempel dan Tanda Tangan)



**FORMAT PELAPORAN AKSI 7 DAN DATA DUKUNG CAPAIAN AKSI HAM PEMERINTAH PROVINSI  
B04, B08, DAN B12 TAHUN 2023**

<b>Kelompok Sasaran</b>	Penyandang Disabilitas		
<b>Aksi 7</b>	Implementasi Pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya.		
<b>Kriteria Keberhasilan</b>	Meningkatnya jumlah daerah yang memasukkan aspek bantuan sosial kemandirian dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di dalam perencanaan dan penganggaran daerah.		
	<b>Ukuran Keberhasilan</b>	<b>Data dukung</b>	<b>Keterangan</b>
B04	Pendataan Kabupaten/Kota yang sudah memasukkan aspek bantuan sosial kemandirian dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran daerah.	Data Kabupaten/Kota yang sudah dan yang belum memasukkan aspek bantuan sosial kemandirian dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di dalam perencanaan dan penganggaran daerah	Sesuai dengan Permensos Nomor 7 Tahun 2022 pasal 11
B08	Rapat persiapan sosialisasi untuk mendorong Kabupaten/ Kota agar memasukkan Perencanaan dan Penganggaran daerah terkait pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas	1. Laporan pertemuan (Dilengkapi dengan Undangan, Daftar Hadir dan Dokumentasi) 2. Hasil Pembahasan	Rapat persiapan dapat dilakukan secara internal
B12	1. Terlaksananya sosialisasi untuk mendorong Kabupaten/Kota agar memasukkan Perencanaan dan Penganggaran daerah terkait pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas 2. Tersedianya rekapitulasi dokumen perencanaan dan penganggaran terkait pemberian bantuan	1. Undangan 2. Daftar hadir 3. Dokumentasi 4. Laporan sosialisasi 5. Dokumen perencanaan dan penganggaran terkait pemberian bantuan sosial di tingkat kabupaten/kota 6. Data bantuan sosial kemandirian dan aksesibilitas Penyandang Disabilitas yang telah diberikan di tingkat kabupaten/ kota	Kegiatan penyusunan rancangan perencanaan dan penganggaran ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan pertemuan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mendorong Kabupaten/ Kota agar dapat melaksanakan pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas di tahun 2024.

	sosialdi tingkat kabupaten/ kota		Dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimaksud adalah dokumen yang sudah ada/terlaksana di kabupaten/kota
--	----------------------------------	--	---

**FORMAT B04 AKSI 7 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

**Provinsi:**

No	Nama Kab/Kota (1)	Bentuk Bantuan Sosial Kemandirian dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas (Sesuai dengan Permensos Nomor 7 Tahun 2022) (2)	Unit Pelaksana Program/ Kegiatan (3)	Sumber Anggaran (4)	Besaran anggaran daerah (5)
1.		<i>(Dapat diisi lebih dari 1)</i>			
2.					
3.	Dst.				

**Keterangan kolom:**

- (1) Nama kabupaten/kota yang dimaksud.
- (2) Bantuan kemandirian dan aksesibilitas yang telah diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota. Pada praktiknya, bantuan sosial ini sangat beragam dari satu daerah ke daerah lain. Bantuan Kemandirian dapat berupa kursi roda, alat bantu dengar, penerjemah bahasa isyarat, sementara aksesibilitas dapat berupa penyesuaian akses transportasi dan gedung atau bangunan.
- (3) Unit pelaksana adalah pemegang kuasa anggaran di daerah yang melaksanakan program bantuan sosial.
- (4) Sumber Anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Kab/Kota, misalnya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Pendapatan Murni Daerah.
- (5) Besaran anggaran yang sudah dianggarkan di dalam APBD terkait bantuan sosial ini; data dapat dibuat secara lebih rinci sesuai dengan jumlah program bantuan yang telah disampaikan oleh Kab/Kota sesuai kolom (2).

**Aspek penilaian:**

1. Bentuk bantuan sosial kemandirian dan aksesibilitas bagi penyandang daerah
2. Keberadaan bantuan sosial kemandirian dan aksesibilitas dalam dokumen perencanaan dan anggaran kabupaten/kota

....., .....

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang  
mengeluarkan data)

(Cap/Stempel dan Tanda Tangan)

**FORMAT B08 AKSI 7 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

<b>Provinsi:</b>		
<b>Rapat :</b>		Persiapan Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran daerah terkait pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas
<b>Jumlah peserta rapat :</b>		<i>(Daftar hadir dilampirkan)</i>
<b>Penyelenggara:</b>		
<b>Hasil Rapat :</b>	1.	
	2.	
	3.	Dst...
<b>Tindak lanjut :</b>	1.	
	2.	
	3.	Dst...

**Aspek penilaian:**

1. Pertemuan pembahasan rencana sosialisasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
2. Lampiran undangan, daftar hadir, dan dokumentasi pertemuan
3. Hasil pembahasan untuk ditindaklanjuti pada kegiatan selanjutnya

....., .....  
 Kepala.....  
 (atau pejabat struktural yang  
 mengeluarkan data)  
 (Cap/Stempel dan Tanda Tangan)



**Aspek penilaian:**

1. Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan, yang dibuktikan dengan laporan sosialisasi (mencakup undangan, daftar hadir, dan dokumentasi)
2. Data bantuan sosial kemandirian dan aksesibilitas yang telah diberikan pada tahun 2022
3. Dokumen perencanaan daerah yang memasukkan bantuan kemandirian sosial dan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Renja dan APBD 2024

....., .....

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang  
mengeluarkan data)

(Cap/Stempel dan Tanda Tangan)

**KELOMPOK SASARAN KELOMPOK  
MASYARAKAT ADAT**

**FORMAT PELAPORAN AKSI 8 DAN DATA DUKUNG CAPAIAN AKSI HAM PEMERINTAH PROVINSI  
B04, B08, DAN B12 TAHUN 2023**

<b>Kelompok Sasaran</b>	Kelompok Masyarakat Adat		
<b>Aksi 8</b>	Mengidentifikasi dan mendata entitas Kelompok Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan		
<b>Kriteria Keberhasilan</b>	Tersedianya jaminan hukum pengakuan dan perlindungan atas hak-hak kelompok masyarakat adat		
	<b>Ukuran Keberhasilan</b>	<b>Data dukung</b>	<b>Keterangan</b>
B04	Terlaksananya pertemuan <b>Pemerintah Daerah Provinsi</b> dengan <b>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> terkait tindak lanjut permasalahan kelompok masyarakat adat yang belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat undangan pertemuan</li> <li>2. Laporan Pertemuan (Notulensi, Dokumentasi dan Daftar Hadir)</li> <li>3. Laporan Tindak Lanjut permasalahan kelompok masyarakat adat yang belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan</li> </ol>	Untuk provinsi yang tidak memiliki Kelompok Masyarakat Adat, provinsi tetap perlu melaksanakan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memastikan informasi terkait keberadaan Kelompok Masyarakat Adat di wilayahnya.
B08	Terlaksananya pertemuan Pemerintah Daerah Provinsi dengan perwakilan Kelompok Masyarakat Adat terkait permasalahan kelompok masyarakat adat yang belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat undangan pertemuan</li> <li>2. Laporan Pertemuan (Notulensi, Dokumentasi dan Daftar Hadir)</li> <li>3. Laporan Pemetaan Masalah</li> </ol>	Bagi provinsi yang tidak memiliki Kelompok Masyarakat Adat berdasarkan hasil pertemuan B04, maka perlu disusun draft kajian/analisis (Bisa dengan melibatkan akademisi atau melalui kegiatan FGD)
B12	Tersedianya kajian akademik Produk Hukum daerah terkait Pengakuan dan Perlindungan Kelompok Masyarakat Adat	Kajian akademik Produk Hukum daerah terkait Pengakuan dan Perlindungan Kelompok Masyarakat Adat	Bagi provinsi yang tidak memiliki Kelompok Masyarakat Adat, provinsi perlu melampirkan hasil kajian/analisis

### FORMAT B04 AKSI 8 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

**Provinsi:**

<b>Nama Kegiatan:</b>	<b>Pertemuan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait Tindak Lanjut Pengakuan Kelompok Masyarakat Adat</b>
<b>Waktu Kegiatan:</b>	
<b>Tempat Kegiatan:</b>	<i>(silakan isi zoom/google meet bila dilakukan secara daring)</i>
<b>Unit Pelaksana:</b>	
<b>Peserta Kegiatan:</b>	
1. Kab	<i>..... orang</i>
2. Kota	<i>..... orang</i>
Hasil pembahasan	<i>(Pembahasan terkait dengan upaya pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengakuan identitas masyarakat adat di daerahnya; pada Laporan B04, kegiatan dapat difokuskan pada pemetaan permasalahan dan kendala pengakuan).</i>

**Lampiran:** Daftar hadir pertemuan, Undangan, dan Laporan kegiatan

**Catatan:** Kegiatan ini berkaitan dengan upaya penyusunan kajian akademik produk hukum daerah terkait dengan Pengakuan dan Perlindungan Kelompok Masyarakat Adat

**Aspek Penilaian:**

1. Kehadiran kabupaten/kota dalam pertemuan
2. Substansi dan hasil pertemuan tentang tindak lanjut pengakuan entitas masyarakat adat yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.

....., .....

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang  
mengeluarkan data)

(Cap/Stempel dan Tanda Tangan)



### FORMAT B08 AKSI 8 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

<b>Nama Kegiatan:</b>	<b>Pertemuan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait Permasalahan (Tantangan dan Kendala) Pengakuan Kelompok Masyarakat Adat</b>
<b>Waktu Kegiatan:</b>	
<b>Tempat Kegiatan:</b>	<i>(silakan isi zoom/google meet bila dilakukan secara daring)</i>
<b>Unit Pelaksana:</b>	
<b>Peserta Kegiatan:</b>	
3. Kab	<i>..... orang</i>
4. Kota	<i>..... orang</i>
Hasil pembahasan	<i>(Pembahasan terkait dengan upaya pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengakuan identitas masyarakat adat di daerahnya; pada Laporan B04, kegiatan dapat difokuskan pada pemetaan permasalahan dan kendala pengakuan).</i>

**Lampiran:** Daftar hadir pertemuan, Undangan, Laporan kegiatan

**Catatan:** Kegiatan ini berkaitan dengan upaya penyusunan kajian akademik produk hukum daerah terkait dengan Pengakuan dan Perlindungan Kelompok Masyarakat Adat yang ditegaskan di dalam target B12 2023.

**Aspek Penilaian:**

1. Kehadiran kabupaten/kota dalam pertemuan
2. Substansi dan hasil pertemuan tentang permasalahan (kendala dan tantangan) pengakuan entitas masyarakat adat yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.

....., .....

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang  
mengeluarkan data)

(Cap/Stempel dan Tanda Tangan)

**FORMAT B12 AKSI 8 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

**Provinsi:**

<b>Judul Kajian:</b>	
<b>Masa waktu Kajian:</b>	
<b>Tim Penyusun :</b>	<i>(Silakan isi nama unit/instansi pemerintah dan/atau nama individu)</i>
<b>Unit Pelaksana:</b>	<i>(Silakan isi nama instansi level eselon 2 atau 3)</i>
<b>Materi Kajian</b>	<b>Pokok Bahasan:</b>  <b>Kesimpulan:</b>  <b>Rekomendasi:</b>

**Aspek penilaian:**

1. Terlaksananya kajian oleh Pemerintah Provinsi
2. Hasil kajian yang sesuai dengan situasi permasalahan, tantangan, dan kendala yang dihadapi daerah terkait dengan pengakuan masyarakat adat.

....., .....

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang  
mengeluarkan data)

(Cap/Stempel dan Tanda Tangan)

**AKSI HAM 1**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA TAHUN 2023**  
**PERIODE B04, B08 DAN B12**

<b>Kelompok sasaran</b>	Perempuan		
<b>Aksi 1</b>	Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah		
<b>Kriteria keberhasilan</b>	Meningkatnya partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.		
	<b>Ukuran keberhasilan</b>	<b>Data dukung</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B04</b>	Perencanaan kebijakan/ program/ kegiatan tentang bantuan usaha dan/atau membangun hubungan kemitraan bagi perempuan kepala keluarga untuk berwirausaha	<p>Dokumen perencanaan kebijakan/ program/ kegiatan/ dokumen lainnya yang terkait tentang bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bagi perempuan kepala keluarga untuk berwirausaha</p> <p><i>*Dokumen perencanaan dapat berupa TOR/KAK/ proposal kerja sama/ kemitraan/ lainnya yang terkait</i></p>	<p>Aksi ini diharapkan agar pemerintah kabupaten / kota mempunyai kebijakan/ program/ kegiatan untuk meningkatkan partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga dalam berwirausaha. Perempuan kepala keluarga dapat merujuk pada Kartu Keluarga.</p> <p>Tahapan pada B04 adalah perencanaan, sedangkan implementasi di B08, dan evaluasi di B12.</p> <p>Berikut adalah beberapa contoh kebijakan/ program/ kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga dalam berwirausaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemudahan akses modal/ simpan pinjam;</li> <li>2. Pemasaran produk/ promosi melalui kegiatan langsung/ digital;</li> <li>3. Kemitraan bisnis;</li> <li>4. Kolaborasi dengan para penyedia platform e-commerce/ marketplace;</li> <li>5. Peningkatan kapasitas dalam berwirausaha;</li> <li>6. Dan lainnya yang mendorong perempuan berwirausaha.</li> </ol> <p>Kebijakan/ program/ kegiatan sendiri tidak harus spesifik kepada perempuan kepala keluarga, tapi</p>

			harus dipastikan bahwa di antara penerima contoh kebijakan/ program/ kegiatan tersebut terdapat perempuan terutama perempuan kepala keluarga
<b>B08</b>	Identifikasi implementasi kebijakan/ program/ kegiatan tentang bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bagi perempuan kepala keluarga untuk berwirausaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar implementasi kebijakan/ program/ kegiatan tentang bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bagi perempuan kepala keluarga untuk berwirausaha;</li> <li>2. Laporan program/kegiatan dan dokumentasi, dengan data terpilah kepala keluarga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan atau produk hukum daerah dapat berbentuk Pergub dan/atau kebijakan/ kegiatan/ program yang dikeluarkan dinas koperasi/umkm atau instansi terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota dan/atau kabupaten/kota (seperti SK Kepala Dinas).</li> <li>2. Kebijakan/ program dapat yang berupa kerja sama/ kemitraan dengan institusi lainnya baik pemerintah, swasta, maupun LSM.</li> </ol>
<b>B12</b>	Evaluasi kebijakan/ program/ kegiatan tentang bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bagi perempuan kepala keluarga untuk berwirausaha yang telah dilaksanakan.	Laporan evaluasi singkat tentang implementasi kebijakan/ program/ kegiatan tentang bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bagi perempuan kepala keluarga untuk berwirausaha.	Laporan evaluasi singkat yang diminta berisikan bentuk kebijakan/ program/ kegiatan yang telah diimplementasi, capaian keberhasilannya, serta tantangan dan kendala yang dihadapi.

**FORMAT PELAPORAN AKSI 1 PERIODE B04  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

**REKAPITULASI PERENCANAAN KEBIJAKAN / PROGRAM / KEGIATAN TENTANG BANTUAN USAHA DAN/ATAU MEMBANGUN HUBUNGAN  
KEMITRAAN BAGI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA UNTUK BERWIRAUSAHA**

Kabupaten/Kota:

No.	Dokumen perencanaan kebijakan/ program/ kegiatan	Ringkasan (garis besar) rencana kebijakan/ program/ kegiatan untuk meningkatkan partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga dalam berwirausaha	Target jumlah perempuan kepala keluarga yang mendapat kebijakan/ program/ kegiatan
1.			
2.			
dst...			

**Aspek Penilaian:**

1. Terdapat dokumen tentang perencanaan kebijakan/ program/ kegiatan untuk meningkatkan partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga dalam berwirausaha;
2. Kebijakan/ program/ kegiatan menyesuaikan keadaan masing-masing daerah (tidak terpaku oleh kegiatan tertentu). Misal, kemudahan akses modal bagi perempuan, promosi, kemitraan bisnis, dan lainnya.

..... , ... / ... / .....  
.....

.....  
NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II*  
*\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

**FORMAT PELAPORAN AKSI 1 PERIODE B08  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

**REKAPITULASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN / PROGRAM / KEGIATAN TENTANG BANTUAN USAHA DAN/ATAU MEMBANGUN HUBUNGAN  
KEMITRAAN BAGI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA UNTUK BERWIRAUSAHA**

Kabupaten/Kota:

No.	Kebijakan/ program/ kegiatan untuk meningkatkan partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga dalam berwirausaha	Waktu pelaksanaan	Pelaksana atau kemitraan/ kerja sama dengan institusi lain dalam melaksanakan kebijakan/ program/ kegiatan (diisi centang)			Keterangan (diisi nama institusi yang menjadi pelaksana atau mitra dari kebijakan/ program/ kegiatan)	Jumlah perempuan kepala keluarga yang mendapat kebijakan/ program/ kegiatan
			Pemerintah	Swasta	LSM		
1.							
2.							
dst...							

**Aspek Penilaian:**

1. Dilaksanakannya kebijakan/ program/ kegiatan untuk meningkatkan partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga dalam berwirausaha;
2. Terdapat jumlah perempuan kepala keluarga yang menjadi sasaran kebijakan/ program/ kegiatan tersebut.

....., ... / ... / .....

.....

.....  
NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II*  
*\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

**FORMAT PELAPORAN AKSI 1 PERIODE B12  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

**CATATAN EVALUASI DARI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN / PROGRAM / KEGIATAN TENTANG BANTUAN USAHA DAN/ATAU MEMBANGUN  
HUBUNGAN KEMITRAAN BAGI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA UNTUK BERWIRAUSAHA**

Kabupaten/Kota:

No.	Kebijakan/ program/ kegiatan untuk meningkatkan partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga dalam berwirausaha	Evaluasi singkat tentang implementasi kebijakan/ program/ kegiatan untuk meningkatkan partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga dalam berwirausaha		Rencana tindak lanjut setelah evaluasi
		Capaian keberhasilan	Tantangan dan kendala	
1.				
2.				
dst...				

**Aspek Penilaian:**

1. Aksi B08 harus dilaksanakan untuk dapat mengisi format aksi B12;
2. Terdapat evaluasi singkat berupa capaian keberhasilan, serta tantangan dan kendala dari kebijakan/ program/ kegiatan terkait peningkatan partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga dalam berwirausaha;
3. Terdapat rencana tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga dalam berwirausaha.

....., ... / ... / .....

.....

.....

NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II*

*\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

**AKSI HAM 2**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA TAHUN 2023**  
**PERIODE B04, B08 DAN B12**

<b>Kelompok sasaran</b>		<b>Perempuan</b>	
<b>Aksi 2</b>		<b>Optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum</b>	
<b>Kriteria keberhasilan</b>		<b>Perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat berhadapan dengan hukum mendapatkan keadilan atas kekerasan yang dialami dalam proses penegakan hukum.</b>	
<b>Ukuran keberhasilan</b>		<b>Data dukung</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B04</b>	Alokasi anggaran APBD tahun 2023 untuk bantuan hukum yang berhubungan dengan perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.	Salinan kutipan APBD tahun 2023 terkait bantuan hukum yang berhubungan dengan perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.	Salinan APBD bisa dalam bentuk DPA SKPD, salinan Perda APBD 2022 yang menunjukkan bahwa sudah ada pengalokasian anggaran bantuan hukum untuk 4 kelompok sasaran.
<b>B08</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat (data terpilah) periode Januari-Juli 2023.</li> <li>2. Adanya catatan praktik baik, kendala dan tantangan pengalokasian bantuan hukum untuk 4 kelompok (perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat) yang dihasilkan dari pertemuan/koordinasi OPD dan/atau hasil penelitian terbaru.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar nama penerima bantuan hukum dari kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat, periode Januari-Juli.</li> <li>2. Lembar format catatan praktik baik, kendala dan tantangan pengalokasian bantuan hukum untuk 4 kelompok (perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat) yang dihasilkan dari pertemuan/koordinasi OPD dan/atau hasil penelitian terbaru.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporkan penerima bantuan hukum yang merupakan kategori perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat saja (data terpilah).</li> <li>2. Lembar format catatan praktik baik, kendala dan tantangan pengalokasian bantuan hukum untuk 4 kelompok (perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat) <i>harap diisi dengan lengkap dan fokus kepada substansi catatan pelaksanaan bantuan hukum kepada 4 kelompok (perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat) saja.</i></li> </ol>
<b>B12</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya persentase jumlah perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat yang mendapatkan bantuan hukum.</li> <li>2. Adanya keseluruhan jumlah perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat yang menerima bantuan hukum periode Januari-November 2023.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pelaksanaan bantuan hukum kepada perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat yang menerima bantuan hukum periode 2023.</li> <li>2. Lembar format nama-nama penerima bantuan hukum dari kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat tahun 2023.</li> <li>3. Total anggaran yang terealisasi pada tahun 2023.</li> </ol>	Persentase pelaksanaan bantuan hukum dihitung dari jumlah penerima bantuan hukum dari 4 kelompok (perempuan, anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat adat) dibagi jumlah keseluruhan penerima bantuan hukum dikalikan 100.



**FORMAT PELAPORAN AKSI 2 PERIODE B04  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

**ALOKASI ANGGARAN APBD TAHUN 2023 UNTUK BANTUAN HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEREMPUAN, ANAK, PENYANDANG  
DISABILITAS DAN KELOMPOK MASYARAKAT ADAT**

Kabupaten/Kota:

No.	Penanggung jawab anggaran	Jenis bantuan hukum <i>(diisi centang)</i>		Besaran anggaran Tahun 2023 (Rp)	Sasaran penerima bantuan hukum pada kelompok sasaran tahun 2023 <i>(diisi centang)</i>			
		Litigasi	Non litigasi		Perempuan	Anak	Penyandang disabilitas	Masyarakat adat
1								
2								
3								
dst...								

**Aspek Penilaian:**

1. Besaran alokasi anggaran ditulis di format laporan;
2. Adanya alokasi anggaran untuk minimal 3 kelompok sasaran dari total APBD;
3. Penanggung jawab anggaran/penyedia layanan bantuan hukum tidak harus pemerintah daerah, namun lebih diutamakan pemerintah daerah (juga sudah menyediakan bantuan hukum.

....., ... / ... / .....

.....

.....  
NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II*  
*\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

**FORMAT PELAPORAN AKSI 2 PERIODE B08  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

**PENERIMA BANTUAN HUKUM DARI KELOMPOK SASARAN PEREMPUAN, ANAK, PENYANDANG DISABILITAS DAN KELOMPOK MASYARAKAT ADAT YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERIODE JANUARI S.D. JULI 2023**

Kabupaten/Kota:

Periode	Jumlah permohonan bantuan hukum				Jumlah yang mendapatkan bantuan hukum			
	Perempuan	Anak	Penyandang disabilitas	Kelompok masyarakat adat	Perempuan	Anak	Penyandang disabilitas	Kelompok masyarakat adat
Januari s.d. Juli 2023								

**Aspek Penilaian:**

1. Adanya permohonan bantuan hukum minimal dari 3 kelompok sasaran;
2. Jumlah yang mendapatkan bantuan hukum minimal dari 3 kelompok sasaran;
3. Apabila dalam hal tidak ada data permohonan bantuan hukum dari keempat kelompok sasaran, maka harus dilampirkan peran aktif pemerintah daerah dalam menyosialisasikan layanan bantuan hukum bagi keempat kelompok sasaran yang sudah ada. Bentuk sosialisasi bisa berupa; 1. Sosialisasi langsung ke daerah daerah; 2. Sosialisasi dalam bentuk zoom kepada perwakilan daerah; 3. Promosi via *media mainstream dan/atau online* (diwajibkan) (website pemerintah daerah, baliho, akun media sosial pemerintah daerah, dan sejenisnya).

....., ... / ... / .....  
.....

.....  
NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II  
\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

**FORMAT LAMPIRAN AKSI 2 PERIODE B08**

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN HUKUM DARI KELOMPOK PEREMPUAN, ANAK, PENYANDANG DISABILITAS DAN KELOMPOK MASYARAKAT ADAT YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERIODE JANUARI S.D. JULI 2023**

Kabupaten/Kota:

No	Nama pemohon bantuan hukum	Periode/tanggal pengajuan permohonan bantuan hukum	Kelompok sasaran (diisi ceklis)			
			Perempuan	Anak	Penyanggah disabilitas	Kelompok masyarakat adat
1						
2						
3						
dst...						

No	Nama penerima bantuan hukum	Periode/tanggal penerimaan bantuan hukum	Kelompok sasaran (diisi ceklis)			
			Perempuan	Anak	Penyanggah disabilitas	Kelompok masyarakat adat
1						
2						
3						
dst...						

....., ... / ... / .....

.....

.....

NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II*

*\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

**FORMAT PELAPORAN AKSI 2 PERIODE B12  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

**PENERIMA BANTUAN HUKUM DARI KELOMPOK SASARAN PEREMPUAN, ANAK, PENYANDANG DISABILITAS DAN KELOMPOK MASYARAKAT ADAT YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERIODE JANUARI S.D. NOVEMBER 2023**

Kabupaten/Kota:

Periode Januari s.d. November 2023	Jumlah permohonan bantuan hukum				Total permohonan bantuan hukum dari 4 kelompok sasaran
	Perempuan	Anak	Penyandang disabilitas	Kelompok masyarakat adat	
	10 (CONTOH)	10	10	0	30
	Jumlah yang mendapatkan bantuan hukum				Total penerima bantuan hukum dari 4 kelompok sasaran
	Perempuan	Anak	Penyandang disabilitas	Kelompok masyarakat adat	
	5 (CONTOH)	5	5	0	

Persentase penerima bantuan hukum dari 4 kelompok sasaran periode Januari s.d. November	Total realisasi anggaran bantuan hukum terhadap 4 kelompok sasaran periode Januari s.d. November
50% (CONTOH)	

**Note:**

\*Penghitungan kolom persentase adalah **(Jumlah yang mendapatkan bantuan hukum : Jumlah permohonan bantuan hukum) x 100**

\*Total realisasi anggaran bantuan hukum terhadap 4 kelompok sasaran Periode Januari s.d. November 2023

**Aspek Penilaian:**

1. Adanya permohonan bantuan hukum minimal dari 3 kelompok sasaran;
2. Jumlah yang mendapatkan Bantuan Hukum minimal dari 3 kelompok sasaran;
3. Terdapat persentase penerima bantuan hukum dari permohonan bantuan hukum;
4. Terdapat total realisasi anggaran bantuan hukum.

....., ... / ... / .....

.....  
NIP. ....

\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II  
\*cap basah instansi pejabat penandatanganan

**FORMAT LAMPIRAN AKSI 2 PERIODE B12**

**PENERIMA BANTUAN HUKUM DARI KELOMPOK PEREMPUAN, ANAK, PENYANDANG DISABILITAS DAN KELOMPOK MASYARAKAT ADAT YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERIODE JANUARI S.D. NOVEMBER 2023**

Kabupaten/Kota:

No	Nama pemohon bantuan hukum	Periode/tanggal pengajuan permohonan bantuan hukum	Kelompok sasaran (diisi ceklis)			
			Perempuan	Anak	Penyandang disabilitas	Kelompok masyarakat adat
1						
2						
3						
dst...						

No	Nama penerima bantuan hukum	Periode/tanggal menerima bantuan hukum	Kelompok sasaran (diisi ceklis)			
			Perempuan	Anak	Penyandang disabilitas	Kelompok masyarakat adat
1						
2						
3						
dst...						

....., ... / ... / .....

.....

.....  
NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II*  
*\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

**AKSI HAM 3**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA TAHUN 2023**  
**PERIODE B04, B08 DAN B12**

<b>Kelompok sasaran</b>	<b>Perempuan</b>		
<b>Aksi 3</b>	<b>Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.</b>		
<b>Kriteria keberhasilan</b>	<b>Peningkatan layanan kesehatan dan psikososial perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.</b>		
<b>Ukuran keberhasilan</b>		<b>Data dukung</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B04</b>	Pemetaan tantangan dan kendala serta rencana tindak lanjut perbaikan sistem rujukan penanganan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, terutama dalam penyediaan layanan kesehatan dan psikososial (kelanjutan dari rekomendasi/rencana B08 tahun 2022).	Daftar pemetaan tantangan, kendala, dan rencana tindak lanjut	Daftar pemetaan tantangan dan kendala adalah hasil evaluasi dari pelaksanaan di tahun sebelumnya.
<b>B08</b>	Tercapainya target pemohon (perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum) yang telah terlayani layanan kesehatan dan psikososial dengan persentase 100%.	Jumlah dan persentase perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum yang telah diberikan layanan kesehatan dan psikososial Januari-Juli 2023	Target 100% adalah terlaksananya layanan kesehatan dan psikososial pada seluruh pemohon (perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum). Maksud dari pemohon yang terlayani adalah pemohon yang sudah mendapatkan layanan (baik perkara hukumnya sudah selesai maupun belum/sedang berjalan)
<b>B12</b>	Pertemuan pembahasan/evaluasi terkait layanan kesehatan dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notulensi pertemuan terkait layanan kesehatan dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.</li> <li>- Dokumentasi pertemuan.</li> </ul>	<p>Pertemuan evaluasi ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, baik oleh internal instansi maupun melibatkan instansi lain, untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dan psikososial telah melayani seluruh pemohon (perempuan dan anak-anak yang berhadapan hukum) sampai 2023 ini.</p> <p>Apabila persentase yang terlayani masih belum mencapai 100%, maka dari pertemuan ini perlu menampilkan kendala/tantangan serta apa yang menjadi strategi/tindak lanjut untuk mengatasi kendala tersebut.</p>

**FORMAT PELAPORAN AKSI 3 PERIODE B04  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

**PEMETAAN TANTANGAN DAN KENDALA SERTA RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN SISTEM RUJUKAN PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Kabupaten/Kota:

No	Pemetaan kendala dan tantangan	Rencana tindak lanjut	Penanggung jawab	Pelaksanaan rencana tindak lanjut (bulan dan tahun)
1				
2				
3				
4				
dst...				

**Aspek Penilaian:**

1. Adanya Pemetaan Kendala dan tantangan;
2. Adanya Tindak Lanjut mengatasi kendala dan tantangan;
3. Adanya Penanggung Jawab;
4. Adanya Pelaksanaan rencana tindak lanjut.

..... , ... / ... / .....

.....  
NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II  
\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

**FORMAT PELAPORAN AKSI 3 PERIODE B08  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

Kabupaten/Kota :

No.	SISTEM PERADILAN	PEMETAAN JUMLAH PEREMPUAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Januari s.d. Juli 2023)		PEMETAAN JUMLAH YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Januari s.d. Juli 2023)				Lembaga Penyedia Layanan
		Perempuan	Anak	Perempuan	Persentase penerima layanan kesehatan (Perempuan)	Anak	Persentase penerima layanan kesehatan (Anak)	
1.	Pidana							
2.	Perdata							

No.	SISTEM PERADILAN	PEMETAAN JUMLAH PEREMPUAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Januari s.d. Juli 2023)		PEMETAAN JUMLAH YANG MENDAPATKAN LAYANAN PSIKOSOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Januari s.d. Juli 2023)				Lembaga Penyedia Layanan
		Perempuan	Anak	Perempuan	Persentase penerima layanan psikososial (Perempuan)	Anak	Persentase penerima layanan psikososial (Anak)	
1.	Pidana							
2.	Perdata							

Note:

Rumus penghitungan persentase penerima layanan psikososial perempuan / anak:

**(Jumlah perempuan/anak yang mendapatkan pelayanan psikososial : Jumlah perempuan/anak yang berhadapan dengan hukum) x 100**

**Aspek Penilaian:**

1. Persentase 100% untuk penerima layanan kesehatan perempuan dan anak;
2. Persentase 100% untuk penerima layanan psikososial perempuan dan anak;

..... , ... / ... / .....

.....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II*

*\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

.....



**FORMAT PELAPORAN AKSI 3 PERIODE B12  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

**CATATAN PERTEMUAN PEMBAHASAN/EVALUASI TERKAIT LAYANAN KESEHATAN DAN PSIKOSOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK  
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Kabupaten/Kota:

<b>Judul kegiatan</b>	:	
<b>Waktu kegiatan</b>	:	
<b>Tempat kegiatan</b>	:	<i>(silakan isi zoom/google meet bila dilakukan secara daring)</i>
<b>Unit pelaksana</b>	:	
<b>Hasil pembahasan</b>	:	
<b>Rencana tindak lanjut</b>	:	

**Aspek Penilaian:**

1. Terdapat hasil pembahasan;
2. Terdapat rencana tindak lanjut terkait perbaikan sistem rujukan penanganan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, terutama dalam penyediaan layanan kesehatan dan psikososial;
3. Melampirkan dokumen notulensi rapat/pertemuan/pembahasan/ evaluasi terkait layanan kesehatan dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

..... , ... / ... / .....  
.....

.....  
NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II  
\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

**FORMAT LAMPIRAN AKSI 3 PERIODE B12  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

Kabupaten/Kota :

No.	SISTEM PERADILAN	PEMETAAN JUMLAH PEREMPUAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Januari s.d. November 2023)		PEMETAAN JUMLAH YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Januari s.d. November 2023)				Lembaga Penyedia Layanan
		Perempuan	Anak	Perempuan	Persentase penerima layanan kesehatan (Perempuan)	Anak	Persentase penerima layanan kesehatan (Anak)	
1.	Pidana							
2.	Perdata							

No.	SISTEM PERADILAN	PEMETAAN JUMLAH PEREMPUAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Januari s.d. November 2023)		PEMETAAN JUMLAH YANG MENDAPATKAN LAYANAN PSIKOSOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Januari s.d. November 2023)				Lembaga Penyedia Layanan
		Perempuan	Anak	Perempuan	Persentase penerima layanan psikososial (Perempuan)	Anak	Persentase penerima layanan psikososial (Anak)	
1.	Pidana							
2.	Perdata							

\*Note:

Rumus penghitungan persentase penerima layanan psikososial perempuan / anak:

**(Jumlah perempuan/anak yang mendapatkan pelayanan psikososial/kesehatan : Jumlah perempuan/anak yang berhadapan dengan hukum) x 100**

**Aspek Penilaian:**

1. Persentase 100% untuk penerima layanan kesehatan perempuan dan anak;
2. Persentase 100% untuk penerima layanan psikososial perempuan dan anak;

..... , ... / ... / .....

.....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II*

*\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

.....

**AKSI HAM 4**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA TAHUN 2023**  
**PERIODE B04, B08 DAN B12**

<b>Kelompok sasaran</b>	Anak		
<b>Aksi 4</b>	Meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak dari kelompok: panti asuhan/ sosial, penghayat kepercayaan, minoritas agama, dan kelompok masyarakat adat (KMA), anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan anak luar kawin.		
<b>Kriteria keberhasilan</b>	Terpenuhinya hak anak atas administrasi kependudukan bagi anak-anak penghuni panti asuhan/ sosial, penghayat kepercayaan, minoritas agama, dan kelompok masyarakat adat (KMA), anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan anak luar kawin.		
<b>Ukuran keberhasilan</b>		<b>Data dukung</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B04</b>	Pertemuan koordinasi pembahasan layanan dokumen kependudukan bagi anak-anak dari 5 (lima) kelompok sasaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi dan hasil pertemuan pembahasan layanan dokumen kependudukan bagi anak.</li> <li>- Tindak lanjut pembahasan bagi masing-masing OPD.</li> <li>- Hasil evaluasi pelaporan tahun 2022 mengenai pemberian layanan dokumen kependudukan bagi anak-anak dari 5 kelompok sasaran.</li> </ul>	Pertemuan koordinasi mengundang instansi-instansi yang menangani 5 kelompok sasaran.
<b>B08</b>	Penyusunan strategi implementasi/inovasi jemput bola dalam rangka peningkatan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada 5 (lima) kelompok sasaran anak, sesuai dengan <b>(sesuai amanat pasal 8 Permendagri 19 tahun 2018)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pertemuan dengan opd terkait</li> <li>- Daftar strategi implementasi/inovasi yang sudah ditetapkan dari masing masing OPD terkait</li> </ul>	Kelompok anak yang menjadi sasaran aksi ini dapat disesuaikan dengan kelompok anak yang ada di daerah.
<b>B12</b>	Evaluasi hasil implementasi/inovasi jemput bola kepada 5 (lima) kelompok sasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil evaluasi;</li> <li>2. Dokumen <i>roadmap</i> (peta jalan) dalam rangka peningkatan layanan pemberian dokumen kependudukan untuk dilaksanakan pada tahun 2024.</li> </ol>	<p>Dokumen <i>roadmap</i> (peta jalan) dimaksud adalah <i>roadmap</i> yang berisi terkait perencanaan timeline program untuk percepatan pemberian layanan di tahun 2024.</p> <p>Dengan adanya <i>roadmap</i> (peta jalan) percepatan tersebut diharapkan alur pemberian layanan di tahun 2024 dan selanjutnya menjadi lebih efisien. (ex: <i>inovasi penyederhanaan birokrasi</i>)</p>

**FORMAT PELAPORAN AKSI 4 PERIODE B04  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

**CATATAN KOORDINASI PEMBAHASAN LAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI ANAK-ANAK DARI 5 KELOMPOK SASARAN**

Kabupaten/Kota:

<b>Nama kegiatan</b>	:	
<b>Waktu kegiatan</b>	:	
<b>Tempat kegiatan</b>	:	<i>(silakan isi zoom/google meet bila dilakukan secara daring)</i>
<b>Unit pelaksana</b>	:	
<b>Peserta kegiatan</b>	:	<i>(apabila asal peserta lebih dari satu, silahkan pisahkan dengan (,) koma)</i>
<b>Evaluasi pemberian layanan dokumen kependudukan (Pada Tahun 2022)</b>	:	
<b>Rekomendasi</b>	:	

**Aspek Penilaian:**

1. Terdapat evaluasi pemberian layanan dokumen kependudukan;
2. Terdapat rekomendasi bagi pemberian layanan dokumen kependudukan bagi anak - anak dari 5 kelompok sasaran;
3. Melampirkan dokumentasi kegiatan.

....., ... / ... / .....

.....

.....  
NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II*

*\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

**FORMAT LAMPIRAN AKSI 4 PERIODE B04  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

Kabupaten/Kota:

No.	Nama organisasi perangkat daerah terkait yang hadir	Tantangan dan kendala dalam pemberian support data kepada dukcapil terkait 5 kelompok anak	Rancangan/rencana/draft tindak lanjut perbaikan dan/atau pengembangan support data terkait 5 kelompok anak
1	Dinas Kesehatan (CONTOH)	Data anak HIV/AIDS masih susah diupdate karena masih banyak orang tua penderita tidak mau terekspose anaknya bahwa terpapar HIV/AIDS	Survey keliling oleh tenaga kesehatan, dan memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat terkait jaminan kerahasiaan data
2			
3			
4			
dst...			

**Aspek Penilaian:**

1. Terdapat Tantangan dan kendala dalam pemberian support data kepada dukcapil terkait 5 kelompok anak;
2. Terdapat Rancangan/rencana/draft tindak lanjut perbaikan dan/atau pengembangan support data terkait 5 kelompok anak layanan dokumen kependudukan bagi anak-anak.

..... , ... / ... / .....

.....

.....

NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II*

*\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

**FORMAT PELAPORAN AKSI 4 PERIODE B08  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

**CATATAN PENYUSUNAN STRATEGI IMPLEMENTASI/INOVASI JEMPUT BOLA  
DALAM RANGKA PENINGKATAN LAYANAN PEMBERIAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN KEPADA  
5 (LIMA) KELOMPOK SASARAN ANAK (SESUAI AMANAT PASAL 8 PERMENDAGRI 19 TAHUN 2018)**

Kabupaten/Kota:

<b>Nama kegiatan</b>	:	
<b>Waktu kegiatan</b>	:	
<b>Tempat kegiatan</b>	:	<i>(silakan isi zoom/google meet bila dilakukan secara daring)</i>
<b>Unit pelaksana</b>	:	
<b>Peserta kegiatan</b>	:	<i>(apabila asal peserta lebih dari satu, silahkan pisahkan dengan (,) koma)</i>
<b>Laporan singkat kegiatan</b>	:	

**Aspek Penilaian:**

1. Terdapat evaluasi pemberian layanan dokumen kependudukan;
2. Terdapat rekomendasi bagi pemberian layanan dokumen kependudukan bagi anak - anak dari 5 kelompok sasaran;
3. Melampirkan dokumentasi kegiatan.

....., ... / ... / .....  
.....

.....  
NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II  
\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

**FORMAT LAMPIRAN AKSI 4 PERIODE B08  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

Kabupaten/Kota:

No.	Nama organisasi perangkat daerah terkait yang hadir	Tantangan dan kendala dalam pemberian support data kepada dukcapil terkait 5 kelompok anak	Daftar strategi implementasi/inovasi yang sudah ditetapkan dari masing masing opd terkait
1	Dinas Sosial (CONTOH)	Data anak panti asuhan belum dapat sepenuhnya teridentifikasi, karena cukup banyak panti asuhan yang lokasinya di pelosok pegunungan	Penambahan tenaga khusus untuk jemput data ke titik – titik panti asuhan yang susah terjangkau
2			
3			
4			
dst...			

**Aspek Penilaian:**

1. Terdapat Tantangan dan kendala dalam pemberian support data kepada dukcapil terkait 5 kelompok anak;
2. Terdapat Daftar strategi implementasi/inovasi yang sudah ditetapkan dari masing masing opd terkait.

..... , ... / ... / .....

.....

.....

NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II*

*\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

**FORMAT LAMPIRAN AKSI 4 PERIODE B12  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

Kabupaten/Kota:

No.	Nama organisasi perangkat daerah terkait yang hadir	Daftar strategi implementasi/inovasi yang sudah ditetapkan dari masing masing opd terkait	Evaluasi hasil implementasi/inovasi yang sudah ditetapkan dari masing masing opd terkait
1	Dinas Sosial (CONTOH)	Penambahan tenaga khusus untuk jemput data ke titik – titik panti asuhan yang susah terjangkau	Terbatasnya anggaran dalam rangka penambahan tenaga khusus dalam rangka jemput data dimaksud
2			
3			
4			
dst...			

**Aspek Penilaian:**

1. Terdapat daftar strategi implementasi/inovasi yang sudah ditetapkan dari masing masing opd terkait;
2. Terdapat evaluasi hasil implementasi/inovasi yang sudah ditetapkan dari masing masing opd terkait;
3. Dilampirkan dokumen *roadmap* (peta jalan) dalam rangka peningkatan layanan pemberian dokumen kependudukan untuk dilaksanakan pada tahun 2024.

..... , ... / ... / .....

.....

.....

NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II*

*\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*



**AKSI HAM 5**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA TAHUN 2023**  
**PERIODE B04, B08 DAN B12**

<b>Kelompok Sasaran</b>	Anak		
<b>Aksi 1</b>	Pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan anak-anak dari kelompok: a. Tinggal di daerah 3T/Kantong Kemiskinan (Perpres Nomor 63 Tahun 2020) b. Kelompok Masyarakat Adat (KMA) c. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)		
<b>Kriteria Keberhasilan</b>	Terpenuhinya hak-hak atas pendidikan anak-anak di wilayah 3T, kantong kemiskinan, anak-anak kelompok masyarakat adat, anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)		
	<b>Ukuran Keberhasilan</b>	<b>Data dukung</b>	<b>Keterangan</b>
B04	Terdapat hasil pemetaan anak-anak usia pendidikan dini (PAUDNI), pendidikan dasar (SD dan SMP/ sederajat), dan pendidikan kesetaraan yang berhak menerima layanan khusus hak-hak pendidikan dari kelompok (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)	Hasil pemetaan anak-anak usia pendidikan dini, dasar/ sederajat, dan kesetaraan dari 3 kelompok sasaran yang berhak mendapatkan layanan khusus hak-hak Pendidikan.	Contoh layanan khusus pendidikan dapat berupa bantuan dana pendidikan, beasiswa, dan bentuk-bentuk lainnya.  Kelompok anak yang dipetakan dapat menyesuaikan kondisi kabupaten/kota masing-masing.
B08	Identifikasi program layanan khusus hak-hak pendidikan anak usia dini, dasar/ sederajat, dan kesetaraan bagi anak-anak dari kelompok (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).	- Hasil pemetaan program yang memuat keterangan dan analisis ketersediaan program layanan khusus hak-hak pendidikan usia dini, dasar/ sederajat, dan kesetaraan bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran.	Kewenangan Kabupaten/Kota terhadap penyediaan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan diatur di dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021.
B12	Pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan anak usia dini, dasar/ sederajat, dan kesetaraan kepada anak-anak dari kelompok (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).	- Daftar anak-anak dari satu atau lebih kelompok sasaran yang mendapatkan layanan khusus hak-hak pendidikan anak usia dini, dasar/ sederajat, dan kesetaraan pada bulan Januari sampai November 2023.	Kelompok sasaran yang disusun dalam daftar anak-anak, dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing kabupaten/kota.

**FORMAT PELAPORAN AKSI 5 PERIODE B04  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

Kabupaten/Kota:

Jumlah anak-anak usia Pendidikan Usia Dini (PAUDNI), Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat dari 3 (tiga) kelompok sasaran yang berhak mendapatkan layanan khusus hak-hak pendidikan				Penjelasan (apabila ada salah satu/ lebih kelompok sasaran yang tidak ada)
Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan	Kelompok Masyarakat Adat (KMA)	Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)	Total (dari 3 kelompok sasaran)	

**Aspek Penilaian:**

1. Terdapat jumlah data terpilah dari 3 kelompok sasaran yang berhak mendapatkan layanan khusus hak-hak Pendidikan Usia Dini (PAUDNI), Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/sederajat, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat;
2. Penjelasan disertai dengan data dukung penguat apabila terdapat salah satu/ lebih kelompok sasaran yang tidak ada.

....., ... / ... / .....  
.....

.....  
NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II  
\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

**FORMAT PELAPORAN AKSI 5 PERIODE B08  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

Kabupaten/Kota:

No.	Program terkait layanan khusus hak-hak Pendidikan PAUDNI, SD/ sederajat, SMP/ sederajat bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran yang diberikan oleh kabupaten/kota	Peruntukan Kelompok Sasaran (Satu program bisa untuk lebih dari satu kelompok sasaran) *dicentang			Pelaksana		Kendala (apabila ada)
		Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan	Kelompok Masyarakat Adat (KMA)	Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)	Pemerintah (sebutkan OPD)	Pihak Lain yang bekerja sama dengan Kab/Kota (sebutkan Lembaga swasta/ LSM/ lainnya)	
1.							
2.							
dst...							

**Aspek Penilaian:**

1. Terdapat program terkait layanan khusus hak-hak Pendidikan Usia Dini (PAUDNI), Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/sederajat, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran yang diberikan oleh kabupaten/kota;
2. Terdapat dokumen lampiran berupa ToR/ Kak program tersebut.

....., ... / ... / .....

.....

.....

NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II*  
*\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

**FORMAT PELAPORAN AKSI 5 PERIODE B12  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023.**

Kabupaten/Kota:

No.	Nama program terkait layanan khusus hak-hak Pendidikan PAUDNI, SD/ sederajat, SMP/ sederajat bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran yang diberikan oleh kabupaten/kota	Jumlah anak usia Pendidikan PAUDNI, SD/ sederajat, SMP/ sederajat yang telah mendapatkan program			Kendala (apabila ada)
		Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan	Kelompok Masyarakat Adat (KMA)	Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)	
1.					
2.					
dst...					

**Aspek Penilaian:**

1. Terdapat layanan khusus hak-hak Pendidikan PAUDNI, SD/ sederajat, SMP/ sederajat bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran yang diberikan oleh kabupaten/kota;
2. Terdapat jumlah anak usia Pendidikan PAUDNI, SD/ sederajat, SMP/ sederajat yang mendapatkan layanan khusus hak Pendidikan;
3. Terdapat laporan singkat pelaksanaan layanan khusus Pendidikan PAUDNI, SD/ sederajat, SMP/ sederajat bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran.

....., ... / ... / .....

.....

.....

NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II*

*\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

**AKSI HAM 6**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA TAHUN 2023**  
**PERIODE B04, B08 DAN B12**

<b>Kelompok Sasaran</b>	Anak		
<b>Aksi 6</b>	Pemberian layanan khusus hak-hak kesehatan anak-anak dari kelompok: a. Tinggal di daerah 3T/Kantong Kemiskinan (Perpres Nomor 63 Tahun 2020) b. Kelompok Masyarakat Adat (KMA) c. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)		
<b>Kriteria Keberhasilan</b>	Terpenuhinya hak-hak atas kesehatan anak-anak di wilayah 3T, kantong kemiskinan, anak-anak kelompok masyarakat adat, anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)		
<b>Ukuran Keberhasilan</b>		<b>Data dukung</b>	<b>Keterangan</b>
B04	Terdapat pemetaan situasi kesehatan anak-anak yang berasal dari kelompok: (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil pemetaan situasi kesehatan anak-anak yang berasal dari kelompok: (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS);</li> <li>Notulensi dan dokumentasi rapat koordinasi pemetaan situasi anak kesehatan anak-anak dari kelompok (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).</li> </ol>	Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021, pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota diantaranya (Dapat disesuaikan dengan kondisi kabupaten/kota) diantaranya: Bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, memiliki gangguan jiwa berat, terduga tuberkulosis, dan/atau memiliki risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>human immunodeficiency virus/HIV</i> ).
B08	Identifikasi program layanan khusus hak-hak kesehatan menengah bagi anak-anak yang berasal dari kelompok (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar program terkait layanan khusus hak-hak kesehatan bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran yang diberikan oleh kabupaten/kota;</li> <li>ToR/ KaK program.</li> </ol>	Pelaksanaan proses pemetaan dapat berdasarkan hasil kajian di lapangan secara langsung dan/atau data dari instansi terkait.
B12	Pemberian layanan khusus hak-hak kesehatan anak-anak yang berasal dari kelompok (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah anak dari salah satu atau lebih kelompok sasaran yang mendapatkan layanan khusus hak-hak kesehatan pada bulan Januari sampai November 2023;</li> <li>Laporan singkat layanan khusus hak-hak kesehatan kepada anak-anak yang berasal dari kelompok (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).</li> </ol>	Contoh layanan khusus kesehatan dapat berupa puskesmas keliling, dan bentuk-bentuk lainnya.

**FORMAT PELAPORAN AKSI 6 PERIODE B04  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

Kabupaten/Kota:

No.	OPD Penanggung jawab	Waktu pelaksanaan rapat pemetaan situasi kesehatan anak-anak yang berasal dari kelompok: (1) tinggal di daerah 3t dan/ kantong kemiskinan; (2) kelompok masyarakat adat (kma); (3) anak dengan penyakit tertentu (hiv/aids)	Peserta
1.			
2.			

**HASIL PEMETAAN**

No.	Kelompok anak	Situasi kesehatan yang perlu mendapatkan penanganan	Rencana program layanan khusus kesehatan	Keterangan.
1.	Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan			
2.	Kelompok Masyarakat Adat (KMA)			
3.	Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)			

**Aspek Penilaian:**

1. Terlaksananya rapat pemetaan pemetaan situasi kesehatan anak-anak yang berasal dari kelompok: (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS);
2. Terdapat pemetaan situasi kesehatan yang perlu mendapatkan penanganan dan rencana program layanan khusus kesehatan.

....., ... / ... / .....  
.....

.....  
NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II  
\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

**FORMAT PELAPORAN AKSI 6 PERIODE B08  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

Kabupaten/Kota:

No.	Program terkait layanan khusus hak-hak kesehatan bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran yang diberikan oleh kabupaten/kota	Peruntukan Kelompok Sasaran (satu program bisa untuk lebih dari satu kelompok sasaran) (diisi ceklis)			Pelaksana		Kendala (apabila ada)
		Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan	Kelompok Masyarakat Adat (KMA)	Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)	Pemerintah (sebutkan OPD)	Pihak Lain yang bekerja sama dengan Kab/Kota (sebutkan Lembaga swasta/ LSM/ lainnya)	
1.							
2.							
dst...							

**Aspek Penilaian:**

1. Terdapat program terkait layanan khusus hak-hak kesehatan bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran yang diberikan oleh kabupaten/kota;
2. Terdapat dokumen lampiran berupa ToR/ Kak program tersebut.

..... , ... / ... / .....

.....

.....

NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II*  
*\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

**FORMAT PELAPORAN AKSI 6 PERIODE B12  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

Kabupaten/Kota:

No.	Nama program terkait layanan khusus hak-hak kesehatan bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran yang diberikan oleh kabupaten/kota	Jumlah yang telah mendapatkan program layanan khusus hak – hak kesehatan			Kendala <i>(apabila ada)</i>
		Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan	Kelompok Masyarakat Adat (KMA)	Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)	
1.					
2.					
dst...					

**Aspek Penilaian:**

1. Terdapat layanan khusus hak-hak kesehatan bagi kelompok sasaran yang diberikan oleh kabupaten/kota;
2. Terdapat jumlah anak yang mendapatkan layanan khusus hak-hak Kesehatan;
3. Terdapat laporan singkat pelaksanaan layanan khusus bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran.

..... , ... / ... / .....

.....

.....

NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II*

*\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*



**AKSI HAM 7**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA TAHUN 2023**  
**PERIODE B04, B08 DAN B12**

<b>Kelompok Sasaran</b>	Penyandang Disabilitas		
<b>Aksi 7</b>	Mendorong upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta.		
<b>Kriteria Keberhasilan</b>	Meningkatnya jumlah perusahaan yang menyediakan sistem dukungan kerja (akomodasi yang layak) penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara daerah dan swasta sesuai dengan ragam disabilitas		
<b>Ukuran Keberhasilan</b>		<b>Data dukung</b>	<b>Keterangan</b>
B04	Pemetaan jumlah BUMD dan Perusahaan Swasta yang menyediakan sistem dukungan kerja (akomodasi yang layak) penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar pemetaan instansi <b>yang sudah</b> menyediakan sistem dukungan kerja (akomodasi yang layak) bagi pekerja penyandang disabilitas (BUMD dan Perusahaan Swasta).</li> <li>- Daftar pemetaan instansi <b>yang belum</b> menyediakan sistem dukungan kerja (akomodasi yang layak) bagi pekerja penyandang disabilitas (BUMD dan Perusahaan Swasta).</li> </ul>	<p>Ketersediaan sistem dukungan kerja (akomodasi yang layak) bagi penyandang disabilitas dipilah sesuai ragam disabilitas.</p> <p>Diharapkan untuk BUMD dan Perusahaan Swasta yang belum memiliki sistem dukungan dimaksud, melakukan perencanaan pembangunan di tahun pelaporan RANHAM saat ini.</p>
B08	Sosialisasi pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja PD untuk BUMD dan Perusahaan Swasta, dengan melibatkan Kementerian terkait. Sesuai dengan <b>pasal 12 huruf (c) UU nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi sosialisasi,</li> <li>- Laporan sosialisasi,</li> <li>- Daftar kendala umum yang masih/sering dijumpai dalam rangka pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas,</li> <li>- Dokumentasi sosialisasi.</li> </ul>	<p>Sosialisasi dimaksud tidak harus dilakukan secara luring, apabila memang tidak ada dana yang mendukung kegiatan dimaksud, dapat menggunakan metode daring.</p> <p>Alternatif lain adalah bekerja sama dengan Instansi pemerintah lainnya dan/atau swasta dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi terkait pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di BUMD dan Perusahaan Swasta.</p>
B12	Perencanaan pembangunan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di BUMD dan Perusahaan Swasta sesuai dengan ragam disabilitas.	Dokumen perencanaan pembangunan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di BUMD dan Perusahaan Swasta sesuai dengan ragam disabilitas	Dokumen perencanaan ditandatangani oleh minimal pejabat setingkat eselon II.

**FORMAT PELAPORAN AKSI 7 PERIODE B04  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

**DAFTAR PEMETAAN BUMD DAN PERUSAHAAN YANG SUDAH/BELUM MENYEDIAKAN SISTEM DUKUNGAN KERJA  
(AKOMODASI YANG LAYAK) BAGI PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS**

**Kabupaten/Kota:**

No.	BUMD	Tersedia (diisi centang)		Ragam Disabilitas (sesuai UU No. 8 tahun 2016) (diisi centang)				Ket. (disebutkan bentuk akomodasi yang layak)
		Ya	Tidak	P.D. Fisik	P.D. Intelektual	P.D. Mental	P.D. Sensorik	
1								
2								
dst...								

No.	Nama perusahaan swasta	Tersedia (diisi centang)		Ragam Disabilitas (sesuai UU No. 8 tahun 2016) (diisi centang)				Ket. (disebutkan bentuk akomodasi yang layak)
		Ya	Tidak	P.D. Fisik	P.D. Intelektual	P.D. Mental	P.D. Sensorik	
1								
2								
dst...								

**Aspek Penilaian:**

1. Terdapat Minimal 1 data dari ragam disabilitas;
2. Terdapat nama instansi pemerintah dan swasta;

....., ... / ... / .....

.....

.....

NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II*

*\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

**FORMAT LAMPIRAN AKSI 7 PERIODE B04  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

**JUMLAH KETERSEDIAAN SISTEM DUKUNGAN KERJA (AKOMODASI YANG LAYAK) BAGI PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS  
DI INSTANSI PEMERINTAH DAN KABUPATEN KOTA**

Instansi	Jumlah yang sudah tersedia	Jumlah yang belum tersedia
BUMD		
Perusahaan swasta		

....., ... / ... / .....

.....  
NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II  
\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

**FORMAT PELAPORAN AKSI 7 PERIODE B08  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

**CATATAN SOSIALISASI TERKAIT PEMENUHAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PEKERJA PD UNTUK INSTANSI PEMERINTAH DAN SWASTA,  
DENGAN MELIBATKAN KEMENTERIAN TERKAIT. SESUAI DENGAN PASAL 12 HURUF (C) UU NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

<b>Nama Kegiatan</b> :	
<b>Waktu Kegiatan</b> :	<i>(waktu dilaksanakan pada masa periode pelaporan B08)</i>
<b>Tempat Kegiatan</b> :	<i>(silakan isi zoom/google meet bila dilakukan secara daring)</i>
<b>Unit Pelaksana</b> :	<i>(apabila unit pelaksana lebih dari 1 (satu), dipisahkan dengan (,) koma)</i>
<b>Peserta Kegiatan</b> :	<i>(diisi asal peserta dan dipisahkan dengan (,) koma)</i>
1. Instansi Pemerintah	.... orang
2. BUMD	.... orang
Rangkuman hasil pembahasan sosialisasi	

**Aspek Penilaian:**

1. Kesesuaian materi sosialisasi
2. Laporan sosialisasi
3. Daftar kendala umum yang masih/sering dijumpai dalam rangka pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas
4. Dokumentasi sosialisasi Materi sosialisasi

....., ... / ... / .....

.....

.....

NIP. ....

*\*penandatangan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II*

*\*cap basah instansi pejabat penandatangan*

**FORMAT PELAPORAN AKSI 7 PERIODE B12  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2023**

**DAFTAR PERENCANAAN / ROADMAP PEMBANGUNAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INSTANSI PEMERINTAH DAN SWASTA SESUAI DENGAN RAGAM DISABILITAS.**

**Kabupaten/Kota:**

No.	Sektor pemerintahan dan/atau BUMD	Periode			Kendala Pelaksanaan <i>(apabila ada)</i>
		Januari - April	Mei - Agustus	September - November	
1					
2					
dst...					

No.	Perusahaan	Periode			Kendala Pelaksanaan <i>(apabila ada)</i>
		Januari - April	Mei - Agustus	September - November	
1					
2					
dst...					

**Aspek Penilaian:**

1. Terdapat dokumen *roadmap (peta jalan)* / perencanaan pembangunan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas;
2. Terdapat rencana pembangunan di tiap periode;

....., ... / ... / .....

.....  
NIP. ....

*\*penandatanganan adalah pejabat (minimal) setingkat eselon II  
\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*